

GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA WAJI
KECAMATAN TELLU SIATTINGNGE KABUPATEN BONE

Disusundandiusulkanoleh

MUHAMMAD HAFIS

NomorStambuk :105610394711



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2017

**GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA
WAJI KACAMATAN TELLU SIATTINGNGE
KABUPATEN BONE**

Skripsi

Sebagaimana syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD HAFIS

Nomor Stambuk : 105610394711

**PROGRAM STUDI ILMU
ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HAFIS

Nomor stambuk : 105610394711

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis atau telah di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, 1 januari 2017

Yang
menyatakan

Muhammad
Hafis

ABSTRAK

MUHAMMAD HAFIS. *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Di
Desa Waji Kecamatan Tellu Siattingge Kabupaten Bone.*
(Dibimbing oleh Muhlis Madani dan Ihyani Malik)

Gaya

kepemimpinan kepala Desa adalah kunci utama dalam keberhasilan Desa karena penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa harus memiliki strategi untuk menentukan gaya kepemimpinan yang harus diterapkan jika kelirumaka efek yang akan dirasakan oleh masyarakat akan sangat memperhatikan

Karena penelitian ini menyadari ini maka Desa yang memiliki kopter kecil dalam sistem pemerintahan harusnya tidak dipandang sebagai manawilayahnya karena penyakit yang terkecil yang akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain sebagai batulan catan kehancuran sistem pemerintahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala Desa Waji memiliki gaya kepemimpinan paternalistic karena menganggap organisasi sebagai miliknyasendiri terlihat dari barang per lengkap kantor Desa sering di bawapulang ini menunjukkan bahwa Kepala Desa belum optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang pemimpin karena gaya yang diterapkan kepala desa Waji tidak sesuai dengan kondisi yang dilapangan maka dari itu diperlukan pengawasan untuk mengatasi kondisi yang saat ini agar tidak menerapkan sistem kekeluargaan maka pengawasan harus betul betul diperhatikan seharusnya kepala desa di Desa Waji menggunakan tipe kepemimpinan Demokratik dan Kharismatik agar masyarakat mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan saran mengenai kepentingan terkait masalah Desa.

Keyword: Demokratik, Kharismatik, otokratik, Militeristik dan Paternalistik.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan seluruh alam semesta tuhan mikroma
 upun makro tampak maupun yang tidak tampak yang
 telah memberikan jalan kepedamukluknyasebagaimanamestinyakarenarahm
 at dan petunjuknyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
 berjudul “ Gaya Kepemimpinan Kepala Desa di
 Desa Waji Kecamatan Tellu Siattingge Kabupaten Bone.

Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam memper
 oleh galarsajana Ilmu Administrasi
 Negara pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
 Makassar

Dengan kesediaan jiwa ku persembahkan Skripsi ini kepada Kedua Orang
 tuatercinta Bundadan Ayahandatercinta Terimakasih atas pengorbanan,
 kesabarandao sertakerelaan untuk melepaskan seorang anak untuk berjuang meng
 enal duniapendidikandengan pengorbanan yang
 tidak ternilai ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi,
 terimakasih juga kepada kakakku juga adikku yang
 sangatsabardalam menerima segalaindakankudanseluruhkeluargabesarku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari beberapa pihak oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M. Si selaku pembimbing I dan Ibu Drs Hj. Ihyani Malik, S, Sos, M. Si selaku Pembimbing II yang

senantiasameluangkanwaktunyamembimbingmengarahkanpenulis,
sehinggaskripsiini dapatdiselesaikan

2. Bapak Dr. Muhammad Idris,
M.SiselakuDekanFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasMuhammadiyah Makassar

3. Bapak Dr. Burhanuddin Sos,
M.SiselakuketuajurusanIlmuAdministrasi Negara
FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitikUniversitasMuhammadiyah
Makassar.

4. Kedua orang tuadansegenapkeluargadantemanteman yang
senantiasamemberikansemangatdanbantuanbaikmorilmaupun moral.

Demi kesempurnaanSripsiini, saran dankritikan yang
sifatnyamembangunsangatpenulisharapkan.Semogakaryaskripsiini
bermanfaatdandapatmemberikansumbangan yang berartibagipihak
yang membutuhkan

Makassar, 05 juli 2017

Muhammad Hafis

DAFTAR ISI

HalamanjudulSkripsi.....	i
Halamanpersetujuan.....	ii
Halamanpenerimaan Tim	iii
HalamanpernyataanKeaslianKaryaIlmiah.....	iv

Abstrak	v
Kata pengantar	vi
Daftar isi	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep gaya kepemimpinan	5
B. Pembangunan Desa	18
C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa	20
D. Kerangka Pikir	24
E. Focus penelitian	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Keabsahan Data	32

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Waji	49
C. Gaya Kepemimpinan Yang Cocok Untuk Desa Waji	64

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Karena wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas

pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan berhasilnya dalam Pembangunan nasional secara umum.

Mengingat aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu diperhatikan adalah kemampuan Kepala desa dan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tetapi hal tersebut belum berjalan dengan baik sebagai mana harapan masyarakat setempat.

Hal tersebut sangat penting, karena Kepala desa beserta aparatnya adalah sebagai penyelenggara utama dalam melaksanakan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan Kepala Desa dan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Cara yang diambil kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari,

terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi riil sementara Aparat Desa waji Kecamatan Tellu Siattinge , Kabupaten Bone sebagai tempat penelitian yang dipilih, menurut pengamatan awal penulis, menunjukkan bahwa Gaya kepala Desa Waji dalam pelaksanaan tugas terutama dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terlaksana dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan.

Belum tersedianya wadah secara baik sehingga penyelenggara desa tidak mengetahui kebutuhan masyarakat dann tidak optimal dalam melaksanakan tugas tugas Desa hal itu terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat desa sebagai penyelenggara yang belum optimal. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa karena yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan Desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan di lapangan. Diantaranya masih belum optimalnya aspek

kelembagaan, sumberdaya manusia, maupun manajemen pemerintahan Desa. Pada tahun 2008 Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, telah melaksanakan Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, kajian ini telah menghasilkan cetak biru yang memuat strategi-strategi penyelesaian masalah (*problem solving*) penyelenggaraan pemerintahan desa dan menyusun modul-modul peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Lebih lanjut modul-modul tersebut merupakan hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu ditingkatkan yaitu Perencanaan & Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, Kepemimpinan Kepala Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam. Oleh karena itulah penulis mengajukan judul proposal penelitian “gaya kepemimpinan kepala Desa waji di kecamatan Tellusiattinge kabupaten Bone.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana gaya Kepemimpinan kepala Desa di Desa Waji Kec. Tellusiattinge Kab. Bone ?
2. Gaya kepemimpinan apa yang cocok dalam kepemimpinan Kepala Desa di Desa Waji Kec. Tellusiattinge Kab. Bone?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala Desa Waji di Kec. Tellusiattinge Kab. Bone
 - b. Untuk mengetahui gaya yang cocok digunakan di Desa Waji Kec. Tellusiattinge Kab. Bone

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai.

1. Bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Desa waji dan masyarakat serta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas desa terutama tugas dibidang tentang kebutuhan pembangunan.
2. Bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang gaya kepemimpinan kepala Desa

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep gaya kepemimpinan kepala desa

Gaya kepemimpinan, mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Davis dan Newstrom (1999). Keduanya menyatakan bahwa pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan.

Menurut Tjiptono (2006) gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain Hersey, 2004 Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi bawahannya (Nawawi, 2003).

Gaya merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruang dan waktu serta dapat memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu seorang Kepala Desa haru tahu dan mampu

memainkan perannya sebagai seorang pemimpin didesanya. Seperti kutipan dari defenisi Peran merupakan perilaku yang di tuntutan untuk memenuhi harapan dari apa yang di perankannya. (Tim penyusun kamus pusat pembina dan pengembangan bahasa, 1985:667/ skripsi, 2010:6). Sehingga seorang kepala desa atau pun seorang pemimpin dalam memimpin tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya. Sebab seorang pemimpin atau kepala desa harus dapat membedakan posisi dirinya dimana disatu sisi dia juga adalah bagian dari warga desa dan disisi lain ia mempunyai tambahan nilai positif yaitu ia adalah seorang kepala desa selaku pemimpin tertinggi di desa dalam roda kepemimpinannya.

Kepemimpinan seorang kepala desa dalam roda pemerintahannya harus mempunyai impian bukan sekedar mimpi saja, dimana ia harus mempunyai visi dan misi yang akan berkembang dan terciptanya program-program yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan dari suatu pembangunan. Untuk patut kita pahami apa itu kepemimpinan. Berdasarkan kata dasar “pimpin” (*lead*) yang berarti bimbing atau tuntun, yang mana didalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam) dan kemudian setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin” (*leader*) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga oranglain tersebut bertindak sesuai dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya apabila ditambah akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih otokratis, sedangkan pemimpin (ketua) cenderung lebih

demokratis, dan kemudian setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi “kepemimpinan” (*leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok, (kepemimpinan pemerintahan indonesia, 2003:1).

Kepemimpinan seperti dikatakan bahwa merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang figur kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Oleh sebab itu Menurut B.H. Raven (kepemimpinan,2005:4) mendefinisikan pemimpin sebagai “seseorang yang menduduki suatu posisi di kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dari posisi tersebut dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan. Sehingga seorang kepala Desa harus tegas dan berwibawa agar orang yang dipengaruhinya dapat menaruh hormat sebagai panutan dalam kehidupannya di desa. Seperti yang dikatakan D.O. Sears (kepemimpinan,2005:4) menyatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memulai suatu tindakan, memberi arah, mengambil keputusan, menyelesaikan perselisihan diantara anggota kelompok, memberi dorongan, menjadi panutan, dan berada di depan dalam aktivitas-aktivitas kelompok. Dan disamping itu kemampuan memimpin pun tidak begitu saja muncul bagaikan mimpin melainkan melalui proses seseorang dalam perkembangan dilingkungannya maupun dalam keluarga sehingga tiap-tiap

pemimpin memiliki ciri sendiri-sendiri dalam seni memimpin. Untuk itu seorang Kepala Desa harus memiliki pengalaman yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam memiliki pengetahuan akan desa yang dipimpinnya sehingga ia mampu memberikan seni memimpinnya dengan baik dihati warganya. Kemudian kemampuan seseorang dalam menjalankan kepemimpinan akan sangat lebih baik dengan pendekatan secara emosional dibandingkan dengan melalui tindakan dengan sistem atau dengan modal kekuasaan secara politik tanpa adanya modal hubungan emosional dengan orang atau kelompok yang dipimpinnya. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh G.U. Cleeton dan C.w. Mason (kepemimpinan pemerintahan indonesia, 2003:2) kepemimpinan menunjukkan kemampuan mempengaruhi orang-orang dan mencapai melalui himbauan emosional dan ini lebih baik dibandingkan dengan melalui penggunaan kekuasaan.

Disamping itu kita perlu memahami dan mengetahui seni-seni dalam memimpin itu sendiri sehingga kita bisa paham dan mengerti model dalam kepemimpinan seseorang dalam memimpin orang atau kelompok yang dipimpinnya. Karena dalam proses kepemimpinan tidak terlepas dari (Gaya Kepemimpinan) seseorang dalam mempengaruhi kelompok atau orang yang mendapat pengaruh tersebut. Jadi kepemimpinan kepala desa juga harus mampu memiliki ciri khas memimpin sesuai kondisi ruang dalam pola kehidupan serta kultur yang berlaku didaerah kepemimpinannya. Ada pun beberapa tipe atau gaya kepemimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan pandangan dan mengetahui model, seni atau gaya kepemimpinan seorang kepala

Desa Terdapat lima gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi menurut Siagian (2002), yaitu:

1. Gaya pemimpin yang otokratik Seorang pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang:
 - a) Menganggap organisasi sebagai milik pribadi
 - b) Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi
 - c) Menganggap bahwa sebagai alat semata-mata
 - d) Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat
 - e) Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya
 - f) Dalam tindaknya penggerakannya sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan punitif (bersifat menghukum)

2. Gaya militeristik Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud seorang pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin modern. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat: Dalam menggerakkan bawahannya sistem perintah yang sering dipergunakan Dalam menggerakkan bawahannya senang bergantung pada pangkat dan jabatan Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya

3. Gaya pemimpin yang paternalistik Gaya kepemimpinan dengan tipe ini memiliki sifat
 - a) Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa

- b) Bersikap terlalu melindungi
- c) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan
- d) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif
- e) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi
- f) Sering bersikap mau tahu

4. Gaya pemimpin yang kharismatik

Harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seorang pemimpin yang demikian sangat diperlukan, akan tetapi sifatnya yang negatif mengalahkan sifatnya yang positif.

5. Gaya pemimpin yang demokratik

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern karena:

- a) Ia senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan
- b) Selalu berusaha mengutamakan kerjasama teamwork dalam usaha mencapai tujuan
- c) Selalu berusaha menjadikan lebih sukses dari padanya
- d) Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin

Dalam buku (kepemimpinan pemerintahan indonesia, 2009:7) yang mengatakan tentang Gaya sebagai berikut :

1. Gaya Demokrasi dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Gaya demokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan, begitu juga antara bawahan dibagi tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antar bawahan di anjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan terendah sekali pun boleh menyampaikan sara serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsesus atas kesepakatan bersama.

2. Gaya Birokrasi dalam Kepemimpinan pemerintahan

Gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus di perlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (*rule*), sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana (*zakelijk*).

Dalam kepemimpinan pemerintahan seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara resmi di kantor pada jam dinas tertentu dan dengan tata cara formal, pengaturan dari atas secara sentralistis, serta harus berdasarkan logika bukan perasaan (*irrational*), taat dan patuh (*obedience*) kepada aturan (*dicipline*) serta terstruktur dalam kerja.

3. Gaya Kebebasan dalam kepemimpinan Pemerintahan

Gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya, metode ini di kenal juga dengan Laissez Faire atau liberalism.

Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas bersaing dalam berbagai strategis ekonomi, politik, hukum, dan administasi. Jadi pimpinan pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi. Hal ini hanya cocok pada daerah yang sudah modren dengan pola pikir bisa dipertanggungjawabkan, tetapi bila di daerah tradisioanal akan membuat masyarakat semakin berada di dalam keterbelakangan.

4. Gaya Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Gaya otokratis dalam pemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan (coercive power).

Cara ini cocok untuk mempercepat waktu di kalangan militer, karena itu diterapkan sistem komando dengan *one way traffic* dalam komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat berakibat fatal bagi daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan bawahan hanya ketika pemimpin pemerintahan sedang memiliki kekuasaan saja.

Dengan melihat dari gaya kepemimpinan ini dapat dijadikan suatu pandangan seperti telah dikatakan sebelumnya. Dimana seorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat desanya dalam mencapai tujuan

dalam pembangunan maka ia juga harus mampu memainkan peranan serta memiliki model atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi desanya. Untuk itu selain gaya kepemimpinan kita juga harus tahu tugas dan tanggung jawab seorang kepala Desa agar dalam kepemimpinannya ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku. Dengan melihat undang-undang yang baru yaitu undang-undang desa no.6 tahun 2014 yang mana dengan jelas dijabarkan tugas dan tanggung jawab seorang kepala desa. Kepala desa adalah seorang pemimpin di desa dimana ia mempunyai hak penuh dan sebagai tokoh yang sangat berperan penting dalam sendi-sendi kehidupan warganya dalam proses pertumbuhan pembangunan di desa. Yang mana sesuai dengan Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014 maka dikatakan pasal 26 dan 27. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, kepala desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebar informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap tahun anggaran.

Kandungan mengenai Pasal 28

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

Pasal 30

1. Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan proses perubahan dari suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lebih baik, oleh karena itu setiap tempat yang dihuni

mahluk hidup dan terkhususnya manusia menginginkan suatu perubahan dari yang kurang menuju yang lebih baik atau yang tidak ada menjadi ada. Pembangunan yang bermakna adalah saat seseorang atau sebuah kelompok dapat merencanakan dan melaksanakan perbaikan dan pemecahan masalahnya sendiri. Persis perumpamaan kuno : seseorang yang disedekahi sekeranjang ikan bakal kenyang selama satu dua hari; jika ia mendapat kail maka kenyanglah dia seumur hidupnya – malah bisa juga menjadi pengeksport cakalang. (pembebasan dan pembangunan, 1997 : hal 04).

Dalam era sekarang ini kata pembangunan bukan merupakan sesuatu yang asing lagi untuk di dengar, namun kata pembangunan itu terkadang hanya dijadikan money politik saja atau sebuah janji-janji manis yang hanya dilontarkan oleh seorang yang hanya menjeri kesempatan dalam menggapai masa. Sehingga pembangunan yang kita harapkan adalah suatu perubahan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin yang mana merupakan hasil representasi dari rakyat tapi kenyataannya rakyat lagi-lagi harus dikecewakan. Untuk itu dalam perkembangannya perlu dilakukan sesuatu bentuk susunan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat bersama wakilnya dalam mencapai apa yang menjadi tujuan mereka bersama.

Oleh sebab itu dalam proses pembangunan di desa perlu diperhatikan tiga aspek pembangunan yang merupakan dimensi dari pembangunan di mana adanya Pembangunan ekonomi, Pembangunan politik, dan Pembangunan sosial. Oleh sebab itu di desa pun harus memperhatikan tiga dimensi pembangunan ini, agar

dalam perkembangannya selalu stabil dan menjadi tolak ukur dari pembangunan itu sendiri.

Sangtlah jelas bahwa dari ketiga dimensi pembangunan yang harus dilakukan didesa, maka harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat maupun pemerintah desa dan yang terlebih khususnya kepala desa sebagai pimpinan yang sangat kuat dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan di desa.

Tidak terlepas dari itu yang harus diperhatikan adalah peran serta aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses maupun awal perencanaan itu dibuat. Sehingga dalam perkembangannya akan menjadi baik sesuai yang diinginkan, seperti perumpamaan kuno tadi bahwa masyarakat harus memiliki kail sendiri sehingga ia mampu bertahan hidup dan mampu memecahkan masalahnya sendiri serta bisa menghasilkan lebih bagi Desanya. Tak lepas dari suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat, tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka dipergunakan teknik-teknik untuk untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan response yang antusias terjamin.

Dengan kata lain secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pembangunan akan berjalan dimana adanya kerja sama antara masyarakat dalam pemerintah desa dalam merumuskan, menetapkan dalam melakukan proses dari pembangunan itu serta adanya kontrol dan pengawasan yang aktif dari keduanya.

Karena Desa adalah bentuk dari suatu negara yang kecil maka perlu menjadi perhatian khusus akan desa itu sendiri. Apalagi dengan keluarnya

Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014 maka disini sangat jelas desa sangat di perhatikan baik secara asal-usulnya, anggaran maupun proses berkembangnya desa itu kearah yang lebih baik, yangmana desa makmur maka Negara pun akan mendapat dampaknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan kepemimpinan kepala desa jika terjadi suatu pembangunan didesa yang berdampak pada masyarakat serta lingkungannya desa dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

5. *Gaya kepemimpinan Direktif*

Gaya kepemimpinan Direktif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pimpinan semata-mata.

6. *Gaya kepemimpinan Konsultatif*

Gaya kepemimpinan Konsultatif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh pemimpin setelah mendengarkan masukan/saran dari bawahan.

7. *Gaya kepemimpinan Partisipatif*

Gaya kepemimpinan Partisipatif adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan.

8. *Gaya kepemimpinan Delegatif*

Gaya kepemimpinan Deleatifadalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih banyak diserahkan kepada bawahan.

B. Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan proses perubahan dari suatu kondisi tertentu kepada kondisi yang lebih baik, oleh karena itu setiap tempat yang dihuni makhluk hidup dan terkhususnya manusia menginginkan suatu perubahan dari yang kurang menuju yang lebih baik atau yang tidak ada menjadi ada. Pembangunan yang bermakna adalah saat seseorang atau sebuah kelompok dapat merencanakan dan melaksanakan perbaikan dan pemecahan masalahnya sendiri. Persis perumpamaan kuno : seseorang yang disedekahi sekeranjang ikan bakal kenyang selama satu dua hari; jika ia mendapat kail maka kenyanglah dia seumur hidupnya malah bisa juga menjadi pengeksport (pembebasan dan pembangunan, 1997 : hal 04).

Dalam era sekarang ini kata pembangunan bukan merupakan sesuatu yang asing lagi untuk di dengar, namun kata pembangunan itu terkadang hanya dijadikan money politik saja atau sebuah janji-janji manis yang hanya dilontarkan oleh seorang yang hanya menjeri kesempatan dalam menggapai masa. Sehingga pembangunan yang kita harapkan adalah suatu perubahan yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin yang mana merupakan hasil representasi dari rakyat tapi kenyataannya rakyat lagi-lagi harus dikecewakan. Untuk itu dalam perkembangannya perlu dilakukan sesutu bentuk susunan perencanaan yang

dibuat oleh masyarakat bersama wakilnya dalam mencapai apa yang menjadi tujuan mereka bersama.

Oleh sebab itu dalam proses pembangunan di Desa perlu diperhatikan tiga aspek pembangunan yang merupakan dimensi dari pembangunan di mana adanya Pembangunan ekonomi, Pembangunan politik, dan Pembangunan sosial. Oleh sebab itu di desa pun harus memperhatikan tiga dimensi pembangunan ini, agar dalam perkembangannya selalu stabil dan menjadi tolak ukur dari pembangunan itu sendiri.

Sangatlah jelas bahwa dari ketiga dimensi pembangunan yang harus dilakukan di desa, maka harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat maupun pemerintah desa dan yang terlebih khususnya kepala desa sebagai pimpinan yang sangat kuat dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan di desa.

Tidak terlepas dari itu yang harus diperhatikan adalah peran serta aktifnya masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses maupun awal perencanaan itu dibuat. Sehingga dalam perkembangannya akan menjadi baik sesuai yang diinginkan, seperti perumpamaan kuno tadi bahwa masyarakat harus memiliki kail sendiri sehingga ia mampu bertahan hidup dan mampu memecahkan masalahnya sendiri serta bisa menghasilkan lebih bagi Desanya. suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat, tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka dipergunakan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar supaya kegiatan dan response yang antusias terjamin.

Dengan kata lain secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pembangunan akan berjalan dimana adanya kerja sama antara masyarakat dalam pemerintah desa dalam merumuskan, menetapkan dalam melakukan proses dari pembangunan itu serta adanya kontrol dan pengawasan yang aktif dari keduanya.

Karena Desa adalah bentuk dari suatu negara yang kecil maka perlu menjadi perhatian khusus akan desa itu sendiri. Apalagi dengan keluarnya Undang-Undang Desa No 06 Tahun 2014 maka disini sangat jelas desa sangat di perhatikan baik secara asal-usulnya, anggaran maupun proses berkembangannya desa itu kearah yang lebih baik, yangmana desa makmur maka Negara pun akan mendapat dampaknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan kepemimpinan kepala desa jika terjadi suatu pembangunan didesa yang berdampak pada masyarakat serta lingkungannya desa dan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

C. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 20014 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

1. Pelaksanaan pembangunan desa
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Menurut Zainun (2012:3-5) terdapat empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum,
- b. Kepemimpinan,
- c. Pengawasan,
- d. Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

- 1) Pelayanan kepada masyarakat
- 2) Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
- 3) Fungsi ketatausahaan atau registrasi (Sawe,2014 6:99)

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab kepala desa.

Menyadari betapa pentingnya tugas pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan

desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya menurut Beratha (2011:37) mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

- a) Tugas bidang pemerintahan
- b) Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat.
- c) Tugas bidang ketatausahaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang tugas-tugas kepala Desa pemerintahan tersebut dijelaskan sebagai berikut,

I. Tugas bidang pemerintahan, meliputi :

1. Registrasi

Registrasi dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan.

2. Tugas-tugas umum meliputi, menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan, tugas-tugas teknis, ketertiban, kesejahteraan dan keamanan,
3. Membuat laporan periodik mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi.
4. Melaksanakan hal-hal yang sudah menjadi keputusan ditingkat desa.
5. Melaksanakan kerjasama dengan instansi ditingkat Desa dan

menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tanah,

II. Tugas bidang pelayanan umum, meliputi

1. Pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin usaha dan izin pendirian bangunan.
2. Memberikan macam-macam keterangan seperti bukti diri, keterangan catatan kepolisian dan sebagainya.

III. Tugas bidang ketatausahaan, meliputi

Dokumentasi data, keadaan wilayah, laporan keuangan dan lain-lain.

Sementara itu, menurut instruksi Mendagri Nornor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditegaskan bahwa "desa mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah dan wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2) Desa mempunyai fungsi (pasal 3), yaitu.

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah.

- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing unsur aparat baik Kepala Desa maupun aparatnya yang terdiri dari : Sekretaris, Kepala-Kepala Urusan, Kepala-Kepala Lingkungan.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari pengertian bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pengertian tersebut membawa ke dalam konsep otonomi asli yang telah dimiliki desa, yang membuat desa mempunyai hak otonomi terbesar dibanding otonomi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam pemerintahannya, Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana Kepala Desa ikut berperan di dalamnya.

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian sbb



E. Fokus penelitian

1. Bagaimana gaya kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa waji.
2. Untuk mengetahui Gayayang cocokdi gunakan kepala Desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Desa waji.

F. Deskripsi fokus penelitian.

Berdasarkan definisi gaya kepemimpinan dapat dipahami bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

1. Gayapemimpinyangotokratik Seorang pemimpin yang otokratik ialah seorang pemimpin yang Menganggap organisasi sebagai milik pribadi Mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi Menganggap bahwa sebagai alat

semata-mata Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya Dalam tindaknya penggerakannya sering mempergunakan approach yang mengandung unsur paksaan dan puntif (bersifat menghukum)

2. Gaya mimpin yang militeristik Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud seorang pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin modern. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat: Dalam menggerakkan bawahannya sistem perintah yang sering dipergunakan Dalam menggerakkan bawahannya senang bergantung pada pangkat dan jabatan Senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya
3. Gaya pemimpin yang paternalistik Gaya kepemimpinan dengan tipe ini memiliki sifat: Menganggap bahwa sebagai manusia yang tidak dewasa Bersikap terlalu melindungi Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi Sering bersikap mau tahu
4. Gaya pemimpin yang kharismatik Harus diakui bahwa untuk keadaan tentang seorang pemimpin yang demikian sangat diperlukan, akan tetapi sifatnya yang negatif mengalahkannya yang positif.
5. Gaya pemimpin yang demokratis Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratis biasanya

digunakan organisasi modern karena Ia senang menerima saran, pendapat dan bahkan kritikan dari bawahan, Selalu berusaha mengutamakan kerjasama teamwork dalam usaha mencapai tujuan, Selalu berusaha menjadikan lebih sukses dari padanya, Selalu berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin

Pelayanan prima merupakan istilah *excellnt service* yang secara harfiah yaitu pelayanan terbaik. Disebut terbaik atau sangat baik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau yang dimiliki instansi pemberi pelayanan sebagai mana hakikat dari pelayanan.

Pelayanan masyarakat adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Lokasi Penelitian*

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Waji Kecamatan Tellusiattinge Kabupaten Bone, Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di desa ini penyelenggaraan pemerintahan belum terlaksana dengan maksimal sebagai mana yang telah diharapkan oleh masyarakat dan kepala desa. Terkait dengan pertimbangan tersebut juga karena Desa waji merupakan desa yang tergolong cukup luas dibandingkan desa disekitarnya, sehingga untuk mewujudkan target yang dibutuhkan seorang pemimpin harus memiliki kapasitas yang cukup dalam melaksanakan kewajiban kepala desa baik skala internal ataupun eksternal, guna mencapai hasil yang diharapkan.

B. *jenis dan tipe Penelitian*

1. jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai gaya kepemimpinan kepala desa serta masalah-masalah yang ditemukan serta jalan keluarnya dalam rangka tercipta optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik yang berdaya guna dan berhasil guna.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif Karena tujuan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan Pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong: 1988 : 2) menerangkan bahwa Penelitian Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya Berdasarkan penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menggambarkan hasil dari gaya kepemimpinan kepala desa di desa Waji Kec Tellusiattingge Kab. Bone karena pada penelitian ini berusaha menemukan data yang berkenaan dengan fakta, fenomena yang terjadi sejak awal jabatan pemerintahan kepala desa waji dalam menjalankan roda pemerintahan , hambatan serta upaya dalam mengoptimalkan tingkat pelayanan kepada masyarakat setempat.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

1. Data primer, data ini adalah data yang diperoleh penulis melalui hasil wawancara sehubungan dengan gaya kepemimpinan Kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa setempat.
2. Data sekunder, adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data data yang sudah diolah sebelumnya menjadi perangkat informasi

tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

D. Informan penelitian

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut

TABEL INFORMAN

NO	KETERANAGAN	JUMLAH
1	KEPALA DESA WAJI	1 (SATU ORANG)
2	PEGAWAI DI KANTOR DESA	3 (TIGA ORANG)
3	KEPALA DUSUN	2 (DUA ORANG)
4	RT	3 (TIGA ORANG)
5	WARGA SETEMPAT	3 (TIGA ORANG)
6	TOTAL	12 (DUA BELAS ORANG)

E. teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

1. Wawancara,

Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Observasi,

Observasi yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung wilayah dan kondisi masyarakat dalam pelaksanaan tugas selama waktu yang ditentukan.

3. Dokumen

Dokumen yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan hasil pelaksanaan tanggung Jawab masing-masing aparat.

F. *Teknik analisis data*

Menurut Miles dan Huberman (Emzir, 2010) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif

6. Reduksi Data adalah Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
7. Data Display Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.
8. Verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel* (dapat dipercaya).

G.Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh lebih jelas dan memiliki kekuatan validitas dan reliabilitas, maka penulis juga melakukan wawancara terhadap pendamping Desa Sedangkan teknik yang penulis lakukan untuk keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi

a. sumber data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dari wawancara. (Paton, 1987)

b. Metode model

Dilakukan untuk menguji sumber data, memiliki tujuan untuk mencari kesamaan data dengan cara yang berbeda.

c. waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan informan dalam kondisi waktu yang berbeda untuk menentukan keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah kabupaten Bone dan gambaran umum objek penelitian yaitu kantor Desa Waji kecamatan Tellusiatinge.

1. Gambaran Umum Kabupaten Bone

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone.

Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

Utara : Kabupaten Wajo dan Soppeng

Timur : Teluk Bone

Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa

Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru.

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13' – 5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42'-120°30' Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis . Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar antara 77–86 persen dengan suhu udara 24,4°C-27,6°C.

Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe hujan Monsoon dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Monsoon memiliki curah hujan tertinggi saat bertiup angin monsun Asia yaitu bulan Januari dan Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian barat. Tipe kedua memiliki kriteria pola hujan terbalik dengan pola monsoon, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah Barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Jumlah curah hujan bulanan di Wilayah Bone bervariasi dengan rata-rata tahunan sebesar 201,25 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Juni yaitu 638 mm dengan banyaknya hari hujan sebanyak 23 hari. Bagian Timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir menjadikan Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke utara. Bagian barat dan selatan terdapat pegunungan dan perbukitan yang celah-celahnya terdapat aliran sungai.

b. Sejarah Kabupaten Bone

Kerajaan Tana Bone dahulu terbentuk pada awal abad ke- IV atau pada tahun 1330, namun sebelum Kerajaan Bone terbentuk sudah ada kelompok-kelompok dan pimpinannya digelar kalula.

Dengan datangnya to manurung (Manurungge Ri Matajang) diberi gelar mata silompoe. maka terjadilah penggabungan kelompok-kelompok tersebut termasuk Cina, Barebbo, Awangpone dan Palakka. Pada saat pengangkatan to manurung mata silompo menjadi Raja Bone, terjadilah kontrak pemerintahan berupa sumpah setia

antara rakyat Bone dalam hal ini diwakili oleh penguasa Cina dengan 10 manurung , sebagai tanda serta lambang kesetiaan kepada Rajanya sekaligus merupakan pencerminan corak pemerintahan Kerajaan Bone diawal berdirinya. Disamping penyerahan diri kepada Sang Raja juga terpatri pengharapan rakyat agar supaya menjadi kewajiban Raja untuk menciptakan keamanan, kemakmuran, serta terjaminnya penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat.

Adapun teks Sumpah yang diucapkan oleh penguasa Cina mewakili rakyat Bone berbunyi sebagai berikut ;

“Angikko Kuraukkaju Riyaaomi’ri Riyakkeng Kutappalireng Elomu Elo Rikkeng Adammukkuwa Mattampako Kilao.. Maliko Kisawe. Millauko Ki Abbere. Mudongirikeng Temmatippang. Muamppirikkeng Temmakare. Musalimurikeng Temmadinging “

Terjemahan bebas ;

“ Engkau Angin Dan Kami Daun Kayu, Kemana Berhembus Kesitu Kami Menurut Kemauan Dan Kata-Katamu Yang Jadi Dan Berlaku Atas Kami, Apabila Engkau Mengundang Kami Menyambut Dan Apabila Engkau Meminta Kami Memberi, Walaupun Anak Istri Kami Jika Tuanku Tidak Senangi Kamipun Tidak Menyenanginya, Tetapi Engkau Menjaga Kami Agar Tenram, Engkau Berlaku Adil Melindungi Agar Kami Makmur Dan Sejahtera Engkau Selimuti Kami Agar Tidak Kedinginan ‘

Budaya masyarakat Bone demikian Tinggi mengenai sistem norma atau adat berdasarkan Lima unsur pokok masing-masing : Ade, Bicara, Rapang, Wari dan Sara

yang terjalin satu sama lain, sebagai satu kesatuan organis dalam pikiran masyarakat yang memberi rasa harga diri serta martabat dari pribadi masing-masing. Kesemuanya itu terkandung dalam satu konsep yang disebut “ SIRI “merupakan integral dari ke Lima unsur pokok tersebut diatas yakni pangadereng (Norma adat), untuk mewujudkan nilai pangadereng maka rakyat Bone memiliki sekaligus mengamalkan semangat/budaya ;

1. *Sipakatua*

Artinya Saling memanusikan , menghormati menghargai harkat dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai mahluk ciptaan tanpa membeda - bedakan, siapa saja orangnya harus patuh dan taat terhadap norma adat/hukum yang berlaku

2. *Sipakalebbi*

Artinya Saling memuliakan posisi dan fungsi masing-masing dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan, senantiasa berperilaku yang baik sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat

3. *Sipakainge*

Artinya Saling mengingatkan satu sama lain, menghargai nasehat, pendapat orang lain, manerima saran dan kritikan positif dan siapapun atas dasar kesadaran bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan

Dengan berpegang dan berpijak pada nilai budaya tersebut diatas, maka sistem pemerintahan Kerajaan Bone adalah berdasarkan musyawarah mufakat. Hal ini dibuktikan dimana waktu itu kedudukan ketujuh Ketua Kaum (Matoa Anang) dalam satu majelis dimana MenurungE sebagai Ketuanya

Ketujuh Kaum itu diikat dalam satu ikatan persekutuan yang disebut Kawerang, artinya Ikatan Persekutuan Tana Bone. Sistem Kawerang ini berlangsung sejak Manurung sebagai Raja Bone pertama hingga Raja Bone ke IX yaitu Lappatawe Matinroe Ri Bettung pada akhir abad ke XVI

Pada tahun 1605 Agama Islam masuk di Kerajaan Bone dimasa pemerintahan Raja Bone ke X Latenri Tuppu Matinroe Ri Sidenreng. Pada masa itu pula sebutan Matoa Pitu diubah menjadi Ade Pitu (Hadat Tujuh), sekaligus sebutan Matoa Mengalami Pula Perubahan Menjadi Arung misalnya Matua Ujung disebut Arung Ujung dan seterusnya

Demikian perjalanan panjang Ke rajaan Bone, maka pada bulan Mei 1950 untuk pertama kalinya selama Kerajaan Bone terbentuk dan berdiri diawal abad ke XIV atau tahun 1330 hingga memasuki masa kemerdekaan terjadi suatu demonstrasi rakyat dikota Watampone yaitu menuntut dibubarkannya Negara Indonesia Timur, serta dihapuskannya pemerintahan Kerajaan dan menyatakan berdiri dibelakang pemerintah Republik Indonesia

Beberapa hari kemudian para anggota Hadat Tujuh mengajukan permohonan berhenti. Disusul pula beberapa tahun kemudi an terjadi perubahan nama distrik/onder distrik menjadi Kecamatan sebagaimana berlaku saat ini.

Pada tanggal 6 April 1330 melalui rumusan hasil seminar yang diadakan pada tahun 1989 di Watampone dengan diperkuat Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bone No.1 Tahun 1990 Seri C, maka ditetapkanlah tanggal 6 April 1330 sebagai hari jadi Kabupaten Bonedan diperingati setiap tahun.

Sejarah mencatat bahwa Bone dahulu merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah didirikan oleh Raja Bone ke-1 yaitu Manurunge ri Matajang pada tahun 1330, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta Arung Palakka pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecenderungan yang bersifat global. Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada masa lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke arah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud Pertama pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut “Ade Pitue”, yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade’ Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan.

Ade Pitu merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan kerajaan Bone yang terdiri dari (tujuh) orang yaitu :

- a. *Arung Ujung*, Bertugas Mengepalai Urusan Penerangan Kerajaan Bone
- b. *Arung Ponceng*, Bertugas Mengepalai Urusan Kepolisian/Kejaksaan Dan Pemerintahan
- c. *Arung Ta*, Bertugas Bertugas Mengepalai Urusan Pendidikan Dan Urusan Perkara Sipil
- d. *Arung Tibojong*, Bertugas Mengepalai Urusan Perkara / Pengadilan Landschap/ Hadat Besar Dan Mengawasi Urusan Perkara Pengadilan Distrik.
- e. *Arung Tanete Riattang*, Bertugas Mengepalai Memegang Kas Kerajaan, Mengatur Pajak Dan Mengawasi Keuangan
- f. *Arung Tanete Riawang*, Bertugas Mengepalai Pekerjaan Negeri (Landsahap Werken – LW) Pajak Jalan Pengawas Opzichter.
- g. *Arung Macege*, Bertugas Mengepalai Pemerintahan Umum Dan Perekonomian.

Selain itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdas cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 pada masa pemerintahan

Raja Bone ke-7 Latenri Rawe Bongkangnge. Kajaolaliddong berpesan kepada Raja bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:

1. *Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau'E mitai munrinna gau'e* (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).
2. *Maduanna, Maccapi Arung Mangkau'E duppai ada'* (Raja harus pintar menjawab kata-kata).
3. *Matellunna, Maccapi Arung Mangkau'E mpinru ada'* (Raja harus pintar membuat kata-kata atau jawaban).
4. *Maepa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng* (Duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar).

Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan ke dalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.

Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih baik. Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone dimasa lalu. Dan sebagai bentuk monumental dari pandangan ini di kenal dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan Tellupocoe atau dengan sebutan lain "lamumpatuo ri

timurung” yang dimaksudkan sebagai upaya mempererat tali persaudaraan ketiga kerajaan untuk memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.

Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak hikmah yang bisa dipetik dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Bone kemudian berkembang terus dan pada akhirnya menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah yang luas, dan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bone memiliki potensi besar, yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dan potensi lainnya.

Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi sumber daya alam serta dukungan SDM, namun patut digaris bawahi jika saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan dengan

berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat. Oleh karena itu diperlukan pemikiran, gagasan, dan perencanaan yang tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya, dan potensi yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan berpegang motto Sumange' Teallara', yakni Teguh dalam Keyakinan Kukuh dalam Kebersamaan, pemerintah dan masyarakat Bone akan mampu menghadapi segala tantangan menuju Bone yang lebih baik.

c. Visi dan Misi Kabupaten Bone

Kabupaten Bone memiliki Visi Masyarakat Bone Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera.

- 1) Sehat yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas,
- 2) Cerdas yaitu Terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal,
- 3) Sejahtera yaitu Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari Tiga Visi kabupaten Bone dijabarkan dalam 6 Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan^{4r} yang berkualitas, terjangkau, adil, dan merata.
- 2) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
- 3) Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan.
- 5) Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
- 6) Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

2. Gambaran Umum Kantor Desa Waji Kecamatan Tellusiatinge Kabupaten Bone

a. Lokasi Kantor Desa Waji Kecamatan Tellusiatinge Kabupaten Bone

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah kantor Desa Waji yang terletak di Kecamatan Tellusiatinge Kabupaten Bone. Secara administratif Desa Waji terdiri atas 6Dusun, dengan luas wilayah 16.75 km², dengan Jumlah penduduk Desa Waji ± 3528 jiwa yang terdiri atas 1664 jiwa laki-laki dan 1864 jiwa perempuan yang tersebar di6 Dusun Dengan jumlah keluarga sebanyak ± 796 KK, Desa Waji mempunyai rata-rata penduduk per-rumah tangga sebanyak 4 jiwa/keluarga. Dari 796 KK penduduk Desa Waji terdapat ± 650 KK yang berprofesi sebagai petani yang terbagi atas Petani perkebunan dan petani holti cultura, usaha

pertanian lainnya yang dikelola secara tradisional (*Sumber profil Desa Januari tahun 2016*).

Potensi yang ada di Desa Waji, antara lain sebagai pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Strategi yang menurut kami cocok digunakan dalam pemanfaatan potensi desa, yaitu antara lain:

Untuk potensi pertanian, perkebunan dan perikanan, masyarakat desa sudah seharusnya dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, pemerintah harus mampu menyediakan bibit-bibit, pupuk ataupun segala sesuatu yang mampu meningkatkan hasil yang diperoleh. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat desa tentang hal-hal yang berhubungan dengan cara-cara atau proses-proses guna meningkatkan hasil produksi. Untuk potensi wisata, jalur dan akses menuju ke desa hendaknya diperbaiki. Hal tersebut dikarenakan, rumah-rumah yang ada ataupun akses jalan menuju ke Desa lanca banyak yang kurang layak digunakan. Tentu, penyebabnya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih rendah. Untuk itu, pemerintah harus memberdayakan masyarakat desa agar dapat memaksimalkan pekerjaan mereka. Dengan kata lain, Selain permasalahan jalan, tentu permasalahan yang lain banyak juga harus dibenahi. Dengan mempertimbangkan hal di atas, maka semua hal itu akan berjalan baik jika ada keseriusan pemerintah baik tingkat kabupaten maupun propinsi, untuk memperbaiki permasalahan khususnya jalan menuju tempat wisata. Dengan begitu, turis-turis yang melalui Desa untuk menuju ke lanca akan lebih terkesan. Dengan kata lain, hal ini

akan mengakibatkan peningkatan wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke sana dan hal ini juga menjadi sumber penghasilan tersendiri bagi pemerintah pada bidang pariwisata serta tentu juga sumber penghasilan bagi masyarakat desa.

Masyarakat di Desa waji kecamatan Tellu Siattingnge ini merupakan masyarakat asli. Akan tetapi banyak juga yang merupakan masyarakat pendatang. Masyarakat pendatang yang ada kebanyakan berasal dari Desa seberang. Suku dan budaya yang ada di desa ini juga beragama islam. Mayoritas suku Bugis hanya ada satu persen suku dari luar. Selain itu, masyarakat di desa ini secara keseluruhan beragama Islam.

Kondisi suku yang mendiami Desa waji tergolong penduduk yang homogen dimana Terdiri dari suku Bugis (90 %) dan suku lain yang ada diindonesia (10%)(*Sumber Data Primer, 2016*).

Pembagian Wilayah Desa:

Adapun Desa Waji terbagi dari beberapa Dusun antara lain:

- 1) Dusun I (Dusun Pattununge) terletak di sebelah Barat Desa.
- 2) Dusun II (Dusun Mauleng) terletak di sebelah Timur dan Utara Desa.
- 3) Dusun III (Dusun Lallere'e) terletak di sebelah Selatan Desa.
- 4) Dusun IV (Dusun Kung) terletak di sebelah Barat dan Utara Desa.
- 5) Dusun V (Dusun Takku)
- 6) Dusun VI (Dusun Kacumpureng).

b. Visi dan Misi Desa Waji

Motto Desa Waji Siap Berjuang Demi Desa Waji Yang Lebih Baik

Visi Desa Waji adalah:

Terwujudnya masyarakat desa waji yang cerdas, religius, sehat dan sejahtera

Visi ini kemudian dijabarkan dalam lima misi desa waji

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana prasarana disegala bidang
5. Meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

c. Struktur organisasi Desa Waji

Kepala Desa
Dra. Hj. Syamsiar, M.Si

Sekertaris Desa
Arnida, S.Pd

Kaur Pemerintahan
Amir Jamad

**Kasi Kesejahteraan
dan pelayanan**
Akbar

**Kaur umum dan
Perencanaan**
A. Nurfaidah

Kaur Keuangan
Roslan

**Kadus
Pattununge
Jamaluddin**

Gambar 2. Susunan Organisasi Desa Waji

d. Gambaran Penelitian

Penelitian ini membahas masalah Gaya kepemimpinan kepala Desa waji di kecamatan Tellu Siattingnge Kabupaten Bone. Dalam melaksanakan pemerintahan didesa pemerintah. Dengan menggunakan karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini juga akan melihat gaya apa yang cocok dalam kepemimpinan atau pelaksanaan tugas kepala Desa didesa waji kecamatan tellusiattingnge kabupaten Bone.

Dalam pelaksanaan tugas kepala desa tergolong tidaklah mudah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan perangkat desa menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas kepala Desa Ditambah Jumlah penduduk didesa Waji yang padat memberikan pengaruh dalam pelaksanaan tugas kepala desa, terlihat pemerintah selalu mengupayakan keterlibatan seluruh masyarakat dengan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat, dan Masyarakat merespon dengan baik pelaksanaan tugas kepala desa sehingga kedepannya diharapkan harmonisasi antara pemerintah desa dan masyarakat bisa membuat desa lebih terbangun dan mandiri serta masyarakat lebih merasakan manfaat dari kinerja pemerintah desa dan lebih sejahtera.

Keberhasilan suatu kepemimpinan dapat dilihat dari pengetahuan dan tingkat pemahaman pelaksana itu sendiri terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemerintahan Desa. Peningkatan kemampuan aparat pelaksana sangat diperlukan untuk terlaksananya suatu kebijakan bisa tepat sasaran. Dan maka dari itu diperlukan adanya informasi yang disesuaikan dengan masalah yang ada, masalah teori dan teknis pelaksana keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

Pembahasan penelitian tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Waji Kecamatan Tellusiatingnge Kabupaten Bone adalah data yang diperoleh dari wawancara yaitu berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan serta dokumen yang menunjang penelitian ini.

Acuan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam lima fokus yaitu: “kepemimpinan otokratik, militeristik, paternalistik, kharismatik dan demokratik, Adapun wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Waji oleh Dra. Hj. Syamsiar, M.Si, Sekdes Arnida, S.pd, Kepala dusun, kepala dusun RT secara keseluruhan ada 12 informan yang akan dijadikan sumber data

Data yang diuraikan berdasarkan hasil triangulasi informan yang diwawancarai dilokasi dan tempat yang berbeda yang selanjutnya direduksi berdasarkan data yang diperoleh.

B. Gaya Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Waji Kecamatan Tellu

Siattingge Kabupaten Bone

Pembahasan mengenai gaya kepemimpinan yang digunakan dalam menjalankan tugas tugas kepla Desa

1. Gaya kepemimpinan otokratik

Dalam pelaksanaan kepemimpinan tidak terlepas dari metode atau gaya yang di gunakan dalam hal ini setiap strategi harus memilik dasar untuk digunakan di Desa yang di bina, karena terkadang setiap gaya kepemimpinan akan menimbulkan masalah karena factor ketidak sesuaian dilapangan atau benturan terhadap budaya atau sosial di desa tersebut, seperti tipe kepemimpinan otokratik karena terkait tingkat kesulitan teknis dalam Kepemimpinannya maka harus ada dasar untuk menggunakan tipe yang diterapkan seperti kriminalitas dipihak lain masalah sosial

yang memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga relatif sulit untuk menentukan tipe yang digunakan.

Begitu juga dengan pelaksanaan suatu proker atau tugas kepala desa tidak terlepas dari kesulitan dalam penerapan atau pengimplementasiannya. Gaya kepemimpinan kepala Desa di Desa waji kecamatan tellu Siattingnge kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil wawancara oleh S ;mengatakan bahwa:

“terkadang menggunakan fasilitas dan membawa pulang untuk digunakan dirumahnya seperti LCD, computer meskipun bukan pekerjaan kantor.(05- juni 2017)

Sesuai yang diungkapkan AI, dari hasil wawancara Menjelaskan bahwa:

“kalau berbicara masalah fasilitas memang kepala Desa sering membawa pulang tapi saya tidak mengaerti apakah penggunaannya sesuai dengan keperluan kantor atau tidak karena saya hanya masyarakat biasa. . (05- juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan pengamatan dilapangan mengenai Gaya kepemimpinan kepala Desa yang diukur dari dari kepemimpinan otokratik, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kepala desa tergolong menggunakan tipe kepemimpinan otokratik karena sering menggunakan fasilitas kantor diluar dari keperluan Desa.

a. Tingkat kemampuan Kepala Desa

Dalam penerapan suatu tipe gaya kepemimpinan tidak mudah untuk diterapkan pada kelompok yang homogen. Sebaliknya, untuk kelompok sasaran yang heterogen,

Gaya kepemimpinan juga akan sulit. Semakin heterogen sebuah kelompok sasaran, maka tingkat kesulitan Gaya kepemimpinan relatif meningkat. Pelaksana tugas desa perlu mengetahui respon masyarakat dengan demikian dapat dilihat tingkat kepekaan Kepala desa kepada masyarakat karena masyarakat merupakan objek. Berdasarkan hasil wawancara oleh AJ mengatakan“

“dalam pelaksanaan kerjacendrung mengikuti apa yang diinginkan kepala Desa karena terkadang desa tidak mengerti dengan apa yang masyarakat inginkan. . (05- juni 2017)

Pendapat yang sama oleh Sn mengatakan

“masyarakat meresponkurang baik, kerja kepala desa dan tidak mendukung setiap ada kegiatan yang diselenggarakan oleh desa karena pendapatnya saja yang ingin didengar contohnya kotong rong yang biasa dilakukan disekitaran rumahnya. . (05- juni 2017)

Pendapat yang dari B1 mengatakan

kurang baik kalo menurut saya, kepala desa kurang mendengar kalo ada kegiatan-kegiatan yg ingin diselenggarakan oleh masyarakat. . (05- juni 2017)

Hal yang berbeda diungkapkan oleh E mengatakan bahwa “persoalan desa saya tidak teralu tau, begitu-begitu saja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan selama dilapangan mengenai Gaya kepemimpinan yang diukur dari tingkat mayoritas, dapat disimpulkan

bahwa Masyarakat merespon kurang baik dengan pelaksanaan tugas kepala desa dilihat dari partisipasi masyarakat karena cenderung mengikuti keputusannya.

Gaya kepemimpinan akan relatif sulit apabila suatu kepemimpinan tidak berlaku toleran kepada masyarakatnya karena jika tidak berlaku toleran maka masyarakat tidak akan ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepala Desa. Sebaliknya sebuah kepemimpinan relatif mudah apabila berlaku adil tanpa ada ego kepada masyarakat. Karena kita menyadari pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya terus meningkat, cakupan dari kelompok dari setiap kegiatan juga akan mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk. Karena tujuan atau sasaran dari suatu Kepemimpinan adalah mensejahterakan atau melayani masyarakat agar mampu keluar dari keterpurukan sebai mana cita-cita Negara.

Berdasarkan hasil wawancara oleh S mengatakan bahwa:

“masyarakat tidak aktif dalam mengikuti agenda-agenda desa walaupun tidak semua masyarakat selalu terlibat tapi kami tetap selalu melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman terhadap masyarakat. . (05- juni 2017)

Sn mengatakan bahwa:

“masyarakat disini sangat kurang aktif dalam agenda-agenda Desa cuman belum semua begitu ada juga yang tidak mengerti soal soal desa jadi tetap dengan kerjaan mereka sendiri. . (05- juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan dilapangan mengenai Gaya Kepemimpinan yang diukur dari tingkat Kinerja, partisipasi masyarakat setempat sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kepemimpinan, terlihat pemerintah

selalu mengupayakan keterlibatan seluruh masyarakat dengan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat

b. perubahan perilaku yang diharapkan

Menyangkut hal ini berhubungan dengan perubahan perilaku dari kelompok masyarakat yang diharapkan dengan kebijakan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara oleh S mengatakan bahwa:

“Semua pasti ingin baik pastinya, dan Desa bisa lebih berkembang dan lebih mandiri serta masyarakat bisa semakin sejahtera dan tentram” . (05- juni 2017)

AJ mengatakan bahwa:

“kami menginginkan kedepannya desa bisa terbangun, anggaran tidak macet-macet dan juga tidak terjadi perbedaan dalam strata sosial dalam masa jabatannya agar masyarakat bisa merasakan peran kepala Desa yang bersifat ideal dalam menggunakan masa kepemimpinannya. . (05- juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan dilapangan mengenai Gaya kepemimpinan yang diukur dari perubahan perilaku yang diharapkan, bisa disimpulkan bahwa perubahan yang diinginkan desa yaitu lebih mengedepankan kekeluargaan menjaga dan hanya sebagian masyarakat lebih merasakan manfaat dari kinerja itu menunjukkan bahwa kepala Desa belum maksimal dalam menjalankan tugas tugas seorang pemimpin sebagai mana tugas dan tanggung jawab yang ada pada kepala Desa dengan adanya penjelasan yang demikian maka diharapkan kepala Desa menjalankan fungsinya sebagai pemimpin.

2. Kepemimpinan Militeristik

Kelompok yang hidup tentu memiliki kebiasaan cara bertahan hidup yang akan membentuk kebudayaan hal ini tidak asing di denganr karena setiap masyarakat atau suku memiliki budaya tersendiri, dalam peranan seorang pemimpin atau kepala Desa tentu memiliki sesuatu yang akan mempengaruhi kepemimpinannya, apakah kepemimpinan militeristik seharusnya dihilangkan karena terkadang suatu kepemimpinan tidak akan cocok dengan budaya yang ada diwilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara oleh S mengatakan bahwa:

“cara kepemimpinan yang digunakan kurang baik karena prinsip yang digunakan sangat kental dengan jabatan yang mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan tugas. . (05- juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan pengamatan dilapangan mengenai Gaya kepemimpinan yang diukur dari kejelasan kenerja , dapat disimpulkan bahwa tipe atau gaya kepemimpinan yang digunakan kurang baik karena mengagap bahwa jabatan adalah sumber kekuasaan.

Suatu gaya kepemimpinan militeristik yang sudah memiliki dukungan teori. Namun konteks gaya kepemimpinan yang digunakan berlatarbelakang dari masalahsosial yang tidak sesuai sehingga kepemimpinan kepala Desa dapat diukur bahwa masyarakat tidak menyukai kepemimpinan ini.

Berdasarkan hasil wawancara oleh S mengatakan bahwa:

“saya sering melihat memberikan beban kerja kepada staf yang seharusnya bukan kerja saya sebagai pegawai biasa disini . (05- juni 2017)

Hal sama juga diungkapkan oleh A mengatakan bahwa :

”Hampir setiap hari saya membersihkan kantor karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai pelayan disini. . (05- juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan dilapangan mengenai gaya kepemimpinan yang diukur dari tipe gaya kepemimpinan militeristik, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan ini sudah memiliki dukungan teori yaitu gaya kepemimpinan militeristik.

Besarnya pengaruh tentunya mendapatkan dukungan sumber daya manusia dalam gaya kepemimpinan tidak bisa dipungkiri. Dalam kepemimpinan akan melalui beberap tahap sehingga pelaksanaannya dan sumber daya yang lainnya sangat dibutuhkan. Karena dalam kepemimpinan suatu akan membutuhkan beberapa dukungan baik staf desa maupun respon masyarakat untuk bisa terlaksananya suatu tujuan desa.

Berdasarkan hasil wawancara oleh S_j mengatakan bahwa:

"seorang pemimpin adalah individu dengan jiwa yang terlatih dan mampu melatih individu individu lain baik mewujudkan fisi yang bersifat seragam. Seseorang pemimpin harus mampu melibatkan dalam unsur keberagaman sifat dan melibatkan semua elemen masyarakat dalam mencapai tujuan yang akan dituju agar kita merasa dihargai. (06 juni 2017)

Ak mengatakan bahwa:

“mengenai pelaksanaan tugas kepala Desa kami tidak mengetahui karena saya hanya melaksanakan dengan apa yang di intruksikan dari kepala desa.. (06 juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan dilapangan mengenai gaya kepemimpinan yang diukur dari krakteristik kepemimpinan, menjalankan kekuasaan terhadap kepemimpinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Gaya kepemimpinan kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan di Desa kurang baik.

Kordinasi dan komunikasi antar Staf atau pegawai dengan Kepala Desa terkait dalam pelaksanaan kepemimpinan merupakan salah satu kunci suksesnya dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan baik itu hubungan keatas atau kebawah. Pemerintah lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat memegang kunci yang sangat penting untuk keberhasilan suatu kepemimpinan. Berdasarkan Hasil wawancara oleh S mengatakan bahwa:

”kordinasi dengan kepla Desa selalu, dan hubungan dengan atasan baik. Jadi tetap hubungan selalu jalan.. (06 juni 2017)

Sn juga mengemukakan hal yang sama mengatakan bahwa:

“saya selain ketua RT juga sebagai penyuluh pertanian jadi lewat ini juga pemerintah Desa berkoordinasi dengan saya terkait pertanian didesa,. (06 juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan dilapangan mengenai gaya kepemimpinan yang diukur dari seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar bawahan ke atasan, dapat disimpullkan bahwa kordinasi berjalan baik antar bawahan dan atasan di desa Waji kacamatan Tellu Siattingnge Kabupaten Bone.

Suksesnya suatu dalam kepemimpinan tidak terlepas dari adanya komitmen dari pemimpin dan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Toleransi pendapat atau memberi peluang kepada masyarakat atau bawahan terkait dalam pengambilan pelaksanaan tugas dan kesungguhan adalah bagian dari komitmen yang ditujukan agar suatu kepemimpinan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta ditujukan kepada masyarakat.

Sn mengatakan bahwa:

“khusus untuk kepala desa sejauh ini dalam pembarian tugas dan dalam di Desacenring membebaskan kepada aparatur desa. (07 juni 2017)

Hal yang sama diungkapkan oleh E mengatakan bahwa:

“saya cuman menerima dari apa yang sudah diberikan kepadasayatapi ini sudah tanggung jawab sebagai bawahan. . (07 juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengamatan dilapangan mengenai gaya kepemimpinan yang diukur dari tingkat Militeristik aparat terhadap pembagian kerja, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini belum memilikisifat Demokratik dilihat dari keseriusan dalam Pengambilan keputusan tentang pembagian kerja dan menjalankan tugas pembangunan hanya masih kurang baik jika ditinjau dari sisi kepemimpinan yang ideal. Tinggal bagaimana kepala Desa lebih memaksimalkan dalam mengemban Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala Desa.

Seberapa besar partisipasi aparat Desa dan Masyarakat terhadap program desadukung dari masyarakat terhadap suatu pemimpin menandakan suatu yang

layak untuk dipertanyakan dalam menentukan pengaruh kepala Desa dalam menggerakkan masyarakat. Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat berarti masyarakat mendukung dan menghargai suatu kepemimpinannya.

Berdasarkan hasil wawancara BA mengatakan bahwa:

“Bisa dikatakan masyarakat sebagai alat bantu untuk melaksanakan tugas kepala desa karena setiap program desa dilaksanakan oleh masyarakat dan kepala Desa hanya memberi intruksi kepada kami.. (07 juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan dilapangan mengenai pengaruh kepala desa dalam mengkoordinir masyarakat sangat terlihat yang kental akan sistem pemberian beban kerja yang diukur dari seberapa masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa kepala Desa melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan atau memberi arahan kepada masyarakat untuk membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terlihat dari setiap agenda-agenda Desa.

Pelaksana ataupun kepemimpinan harus diberikan kejelasan aturan agar tercipta pembagian tugas yang jelas dan menghindari kerancuan yang menyebabkan kegagalan dalam kepemimpinannya.

Hasil wawancara IG mengatakan bahwa:

“sebenarnya terkait kepemimpinan sudah jelas tinggal bagaimana kepala Desa bisa paham dalam menjalankan tugasnya supaya bisa melaksanakan dengan penuh konsistensi agar berjalan dengan baik. . (07 juni 2017)

KG mengatakan bahwa:

“kepala desa memberi tugas sesuai dengan bidang masing masing, dan kepala desa tidak berani memberi tanggung jawab kepada staf yang tidak pada wilayah kerjanya. . (07 juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan dilapangan mengenai gaya kepemimpinan yang diukur dari tipe Militeristik yang ada pada pelaksana, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa belum menjalankan aturan dalam melaksanakan kerja-kerja di desa dan senang bergantung pada bawahannya meskipun tidak sesuai aturan dalam melaksanakan kerja-kerja di Desa.

3. Kepemimpinan Paternalistik

Faktor sosial dalam masyarakat adalah salah satu variabel pokok yang mempengaruhi proses kepemimpinan Kondisi keterbukaan sebagai penggerak dimasyarakat dan sosial sebagai pengontrol. Landasan dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan terlepas dari kondisi seperti ini.

IM mengatakan bahwa:

“keputusan biasanya ditetapkan oleh kepala Desa karena setiap keputusan harus mendapat rekomendasi dari kepala Desa. . (07 juni 2017)

JD juga menuturkan hal yang sama mengatakan bahwa:

“Kepala Desa sangat sulit untuk memberikan kepercayaan kepada warga yang bukan keluarga dekatnya hingga masyarakat sulit untuk memberikan saran. . (07 juni 2017)

JH mengatakan bahwa:

“apa yang saya disuruh itu yang saya kerja, karena keputusan tertinggi ada di kepala Desa, apa lagu saya hanya hanya lulusan SMA. . (07 juni 2017)

berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan dilapangan mengenai gaya kepemimpinan yang diukur dari kondisi sosial Mengenai kepemimpinan paternalisti telah memberikan sedikit sifat yang mendekati, budaya masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dapat disimpulkan bahwa tidak dapat pungkiri persoalan yang ada didesa sudah memiliki ciri yang mendekati.

Suatu kepemimpinan akan mudah ketika masyarakat ikut mendukung hadirnya kepemimpinan kepala Desa, dalam hal ini tentu harus memiliki toleransi yang tinggi untuk mendapatkan dukungan dari pada masyarakat,

CS mengatakan bahwa:

“sejauh ini belum ada Kotak saran di kantor Desa, karena kepala desa menganggap kalau masyarakat seperti saya tidak memiliki pendidikan yang tinggi tidak mungkin orang seperti saya akan menyampaikan saran. . (08 juni 2017)

BS mengatakan bahwa

“terkadang kepala Desa salah persepsi dalam mengambil keputusan mengenai bantuan infrastruktu untuk bantuan kepada petani meskipun masyarakat petani sudah memberi saran dan alasan dengan tindakan yang akan ia lakukan. (08 juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan dilapangan mengenai implementasi kebijakan yang diukur dari dukungan publik terhadap sebuah keputusan bantuan mengenai bantuan petani dapat disimpulkan bahwa untuk sejauh ini publik kurang mendukung kebijakan pemerintah Desa karena setiap keputusan harus sesuai

dengan kehendak kepala desa dari hasil wawan cara ini dapat disimpulkan bahwa kepala desa juga memiliki sifat yang tergolong sebagai kepemimpinan paternalistic.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan suatu kelompok pemilih seperti: intervensi dari kelompok pemilih melalui kedekatan emosional dan kritik berupa komentar kepada badan pelaksana kegiatan sehingga ada potensi akan terjadi suatu agenda diubah. kelompok pemilih melakukan negosiasi atau loby kepada kepala desa untuk mempengaruhi pelaksana dalam menerapkan agenda.

Hasil wawan caraSU mengatakan bahwa:

“ tentu kami sebagai pemerintah yang terpilih harus berikap berani mengambil keputusan dan apa pun resikonya dan transparan dalam pelaksanaan tugas yang diamanahkan. (08 juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dan pengamatan dilapangan mengenai gaya kepemimpinan yang diukur dari sikap kepemimpinan paternalistik kelompok pemilih pemerintah harus memegang amanah dan akan tetap bersikap berani mengambil keputusan dalam menjalankan pemerintahan di Desa meskipun itu jauh dari harapan masyarakat hal ini sangat mendekati tipe kepemimpinan tipe paternalistic.

4. Kepemimpiana Kharismatik

Setiap masyarakat tentu mengharapkan kepemimpinan yang bisa membawa kearah perbaikan karena itumasyarakat memerlukan pemimpin yang bisa melihat dan bergerak dalam malakukan dengan apa yang terjadi dilapangan, meskipun demi kian

tidak menutup kemungkinan jika setiap masyarakat membutuhkan harapan mengenai seseorang pemimpin yang diharapkan mengenai kepemimpinan Khrismatik adalah tipe kepemimpinan yang bisa di praktekkan tetapi tipe seperti ini sangat sulit ditemukan. Berdasarkan dari hasil wawancara dilapangan

SA mengatakan bahwa:

“kalau ada masalah terkadang kepala Desa bisa menyelesaikan dan terkadang hanya dibiarkan berlarut larut sehingga masalah satu dengan yang lain akan menjadi beban masrakat. (11 juni 2017)

Sesuai yang dikatakan Uks

Kurang sejalan dengan pemikiran saya itulah sebabnya saya kurang aktif jika ada agenda atau kotong royong yang di adakan oleh Desa.(11 juni 2017)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kepala desa belum mampu untuk menyelesaikan masalah dengan cepat sehingga masyarakat desa kurang aktif dalam agenda agenda dalam keterlibatannya dalam mengikuti kegiatan desa, mengenai pergerakan juga tidak bisa menggerakkan masyarakat diakibatkan kurang mengerti tentang apa yang menjadi keluhan masyarakat, ini membuktikan juga bahwa setiap pemimpin harus mengerti tentang apa yang menjadi masaalah dilapangan dengan demikian mengerti saja tidak cukup dalam menjalankan krakter atau seorang pemimpin karena jika dilakukan dengan eksikusu maka sama saja dengan mendengarkan cerita yang tidak ada ujungnya, tentu ini diharapkan oleh masyarakat

Permasalahan yang ada pada masyarakat harus diketahui pasti oleh seorang pemimpin apatah lagi mengenai tipe kepemimpinan Kharismatik memiliki kemampuan untuk menjangkau dampak yang akan menimpa masyarakat jika tidak melakukan tindakan yang bergerak untuk menunda atau memanipulasi dengan masalah yang akan datang. Dengan demikian penulis melakukan observasi lapangan dengan

BE mengatakan

“Kepala desa tidak pernah memberi arahan kepada kami sebagai petani mengenai untuk berjaga-jaga untuk kedepan karena sangat sulit mendapatkan perhatian dari kepala desa malahan kita sebagai masyarakat yang memberikan perhatian kepadanya. (11 juni 2017)

Dapat disimpulkan bahwa tipe kepemimpinan Kharismatik tidak dimiliki oleh kepala Desa waji karena sesuai dengan hasil observasi dan wawancara lapangan mengenai tipe atau gaya kepemimpinan kepala desa yang digunakan oleh Desa oleh sebab itu kepala Desa harus mengerti tentang apa yang seharusnya diterapkan di desa waji.

5. Kepemimpinan Demokratik

Gaya Demokratik memiliki keunggulan karena tipe seperti ini memiliki sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat desa jika ia bersifat sebagai mana mestinya artinya tidak mengurangi sifat atau hakikat dari demokratis itu sendiri.

Mengenai tipe ini peneliti mencoba melihat dari persepsi masyarakat desa waji untuk mengetahui apakah kepala desa waji memiliki sifat demokratik yang sesuai dengan harapan masyarakat, dari itu data yang dihasilkan berdasarkan dari hasil wawancara mengatakan bahwa

“belum memberikan secara penuh dalam berpentapat kerana dua bulan yang lalu kami meminta agar di desa ini diadakan kegiatan kemasyarakat tetapi tidak mendapatkan respon dari kepala Desa. (13 juni 2017)

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Dg mengenai setiap pertemuan rapat kantor Desa.

DG mengatakan :

“Setiap ada rapat sangat jarang ada respon dari kepala Desa, meskipun sering mengadakan rapat apa artinya kalau tidak mau mendengar saran dari peserta rapat. (13 juni 2017)

Tipe kepemimpinan Demokratik juga senang bekerja sama dengan bawahannya karena tipe seperti ini menganggap bahwa untuk mencapai visi dari organisasi harus menggunakan kekuatan atau bantuan secara penuh dengan seluruh elemen masyarakat. Tipe seperti ini sangat berbeda dengan tipe paternalistic yang menganggap kalau organisasi itu miliknya sendiri.

Dar hasil wawancara DK mengatakan :

“Kepala Desa belum mampu menggerakkan elemen masyarakat secara penuh karena pemikiran sebagian masyarakat dan kepala desa tidak sejalan hanya sebagian saja masyarakat yang ikut serta.(13 juni 2017)

Berdasarkan dari data yang didapati di lapangan dari observasi dan wawan cara maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepala desa belum memiliki tipe atau tidak menggunakan tipe kepemimpinan demokratik factor penyebab dari penggunaan seperti ini karena diakibatkan oleh ego pemimpin atau selalu menggap bahwa kekuasaan dan keputusan tertinggi ada pada seorang pemimpin sehingga terjadi belenggu yang mengakibatkan penyakit dalam pemimpin maka dari itu seharusnya ego itu dihapuskan agar menjalankan kekuasaan sesuai dengan koridor kepemimpinan apa bila tidak maka akan menjadi masalah yang tidak kunjung usai hingga generasi yang akan datang memandang kita sebagai pendahulu yang haus akan kekuasaan.

C. Gaya Kepemimpinan Yang Cocok Dalam Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Waji kec. Tellu Siattingge kabupaten Bone

1. Gaya kepemimpinan yang cocok di Desa Waji

Pada dasarnya dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin atau Kepala Desa untuk membangun dan menjaga kestabilan masyarakat di Desa tentu setiap pemimpin atau selaku kepala desa memiliki karakteristik bagaimana cara yang digunakan dalam menjalankan tugasnya dan dapat dipastikan bahwa keberhasilannya tergantung dari sang pemimpin, apakah pemimpin yang menjabat memiliki gaya yang cocok atau tidak sesuai suatu wilayah untuk menjalankan apa yang ingin dicapai.

Menurut peneliti dari observasi lapangan dalam mengemban amanat sebagai pemimpin, kepala Desa di desa Waji harus menggunakan dua tipe kepemimpinan yaitu tipe Kharismatik dan Demokratik karena hanya tipe ini yang cocok untuk digunakan Khususnya di desa Waji.

Pelaksanaan dapat dilihat bahwa sampai sejauh ini dalam pelaksanaan tugas kepala desa dari data yang dihasilkan D mengatakan bahwa :

“Saya sangat senang jika kepala desa mampu memberikan kepercayaan kepada kami baik dalam bertindak dan menyampaikan aspirasi mengenai keluhan di desa. (14 juli 2017)

Dari hasil pengamatan peneliti di Desa Waji dari tiga tipe yang terjadi di lapangan akan mengakibatkan lima permasalahan yaitu:

- a. Masyarakat termarginalkan
- b. Masyarakat kurang memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan.
- c. masyarakat kurang aktif membantu pemerintah Desa
- d. Belum tersedianya layanan menyeluruh dan
- e. Minimnya kemampuan aparat desa

Tugas kepala Desa memang sangat rumit terlihat dari yang dikatakan GH: bahwa:

“jika kepala desa bisa menggerakkan seluruh elemen masyarakat berarti kepala desa disukai oleh rakyatnya saya sebagai masyarakat biasa tentu saya mengharapkan hal yang demikian karena efeknya tentu positif. (14 juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari pengamatan dilapangan mengenai gaya kepemimpinan yang cocok dalam pelaksanaan tugas kepala Desa yaitu mengkolaborasikan dari dua tipe gaya kepemimpinan yaitu tipe kharismatik dan demokratik karena dengan tipe ini pemerintah desa tidak lagi membeda bedakan masyarakat mekipun tidak memiliki hubungan keluarga dengan kepala Desa atau orang orang yang tidak tinggal disekitaran Kediaman kepala desa, tipe kepemimpinan Demokratik akan menghapus perbedaan masyarakat yang dimana tujuan seorang pemimpin hanyalah mensejahtrekan melindungi dan membebaskan masyarakat dari keterpurukan baik ekonomi maupun moral.

Tipe kepemimpinan demokratik yaitu tipe yang yang sangat sesuai diterapkan di kepemimpinan desa waji karena tipe demokratik memiliki tingkat sosialisasi dan keterbukaan kepada masyarakat sangat tinggi kepemimpinan seperti ini cenderung mengikutkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam menentukan proker agar tercapainya visi dan misi desa

Berdasarka dari hasil wawancara F mengatakan:

“saya memang tidak memiliki sekolah seperti mereka tetapi setidaknya jangan hanya mengambil keputusan yang hanya murni dari aparatur desa. (14 juli 2017)

Merujuk pada salah satu data diatas maka jelas terjadi perbedaan dalam kepemimpinan kepala desa dalam memutuskan musywarah

berdasarkan dari data yang lain Z mengatakan bahwa;

“kami selalu menyampaikan usulan tetapi yang cenderung usulan yang diberikakan oleh kepala Desa tidak diterima karena biasanya usulan yang diberikan tidak sesuai keinginan kepala Desa. (14 juli 2017)

Penulis mengamati bahwa meskipun perencanaan atau progker sudah mapan jika pekerja tim pelaksana tidak dimiliki atau tidak mendukung proker desa maka proker hanyalah menjadi mimpi buruk bagi seorang pemimpin karena jelas bahwa jika masyarakat tidak mengerti tentang apa yang akan dilakukan maka masyarakat tidak akan ikut andil dalam melaksanakan proker desa.

Berdasarkan dari wawancara K mengatakan :

kegiatan gotong royong masyarakat selalu ikut serta, mengenai proker desa yang lain sudah ada, tetapi hanya sebagian yang jalan masyarakat kurang aktif dalam proker desa yang lain. (14 juli 2017)

Dari data yang diatas maka penulis melihat dan mengamati bahwa gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan gaya kepemimpinan kharismatik dan demokratik

Faktor yang menjadi alasan peneliti memilih kharismatik sebagai pelaksanaan tugas kepala Desa karena jika menggabungkan tipe ini akan sesuai dengan tipe kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat Desa waji

Mengingat dari observasi dilapangan dari Fj mengatakan ;

“Kepala Desa belum mampu mengrahkan kepada masyarakat secara serentak, lain cerita jika menyangkut gotong royong karena itu kehendak mereka sendiri bias dikatakan budaya yang sudah ada sejak dahulu. (15 juli 2017)

Berdasarkan yang dikatakan Dg mengatakan :

“program Desa belum mampu berjalan sesuai dengan rencana karena masyarakat kurang aktif seharusnya masyarakat sadar bahwa ikut serta dalam menjalankan program kerja akan berdampak positif bagi dirinya sendiri. (15 juli 2017)

Peneliti menilai bahwa kepala Desa tidak memiliki kharismatik dalam kepemimpinannya karena belum mampu menggerakkan elemen masyarakat secara menyeluruh sedangkan dalam tipe kepemimpinan kharismatik mampu menggerakkan masyarakat tanpa terkecuali di wilayah kekuasaannya, tipe ini juga memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah dengan cepat tanpa menunggu rentang waktu yang lama maka dari pengamatan peneliti gaya yang harus dimiliki kepala desa waji yaitu gaya kepemimpinan kharismatik dan demokratik

Dapat dilihat dan di percayai bahwa semua pemimpin menginginkan kemakmuran masyarakatnya akan tetapi sifat ketamakan seseorang yang membuat lupa akan tindakan yang dilakan karena memiliki beberapa factor kemungkinan ini diakibatkan melupakan atau tidak paham tentang undang undang desa ataukah keilmuannya belum sampai pada makannya itu berarti belum sepatasnya menjadi seseorang pemimpin tetapikarena nepotisme yang menghantarkannya memegang jabatan sedemikian akibatnya masyarakat yang harus menanggung beban selama masa jabatannyakarena hal ini telah menjadi pengalaman empiris pemerintahannya agar

penyesalan tidak berulang kembali maka masyarakat harus mempertimbangkan kembali mengenai pemilihan kepala Desa preode yang akan datang.

Penulis merekomendasikan agar sekiranya kepala desa harus memiliki kemampuan yang bisa menjawab aspirasi masyarakat desa, kepala desa juga harus menjadikan UU Desa sebagai rujukan dalam mencapai cita cita bangsa karena didalamnya mengandung tugas dan tanggung jawab sebagai kapala Desa dengan demikian yakin dan percaya masyarakat akan merespon baik tentang kegiatan yang akan dilaksanakn oleh kepala Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Gaya Kepemimpinan Kepala Desa di Desa waji Kecamatan Tellu Siattingge Kabupaten Bone maka peneliti memandang antara lain :

1. Kepala Desa Waji belum mampu melihat titik permasalahan yang terjadi di lapangan karena terlihat dari konsep atau tipe kepemimpinan yang digunakan seperti paternalistik militeristik dan otokratik sehingga masalah selalu menumpuk di akibatkan metode yang di gunakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maka dari itu peneliti menghibau agar setiap kepala Desa menerapkan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi dilapangan.
2. Dari beberapa tipe kepemimpinan seperti Demokratik Kharismatik Paternalistic Militeristik dan Otokratik peneliti menyimpulkan bahwa tipe yang cocok digunakan oleh Kepala Desa Waji yaitu tipe Kharismatik dan Demokratik karena kedua tipe ini mampu menggerakkan dan memberi kebebasan kepada masyarakat di desa di dalam berargumen dan bertindak demi kebaikan Desa karena dalam sifat manusia tidak pernah mampu melepaskan diri dalam kekeliruan baik dalam berpikir maupun bertindak kehadiran tipe kepemimpinan Demokratik Kharismatik maka sedikit mudahnya membantu untuk mencapai visi misi Desa dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat Desa maka dari itu kepala Desa harus bisa menerima saran dan kritik dari masyarakat setempat agar dapat menghilangkan ego dalam menjalankan masa kepemimpinannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Setiap kepala Desa harus mampu mendengar aspirasi masyarakat Desa
2. Kepala Desa harus bertindak aktif dalam menanggapi masalah masalah yang ada di Desa dan harus menyelesaikan masalah yang dihadapi agar masyarakat tidak terbebani dengan apa yang menjadi permasalahan.
3. Dalam agenda pembangunan untuk kemajuan Desa, semua kalangan diharapkan bisa ikut andil dalam menyukseskan terlaksananya program Desa tidak diam dan berpangku tangan.
4. Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin kepala Desaharus mampu menghilangkan diskriminasi dan ego dikalangan masyarakat demi tercapainya masyarakat yang makmur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Press J
- Beratha, I Nyoman. 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Ghalia Indonesia.
- B.h ravan.2006 *Kepemimpinan Dasar Dasar Pembangunan*. Yogyakarta : penerbit
- Buchari, Zainuddin 2000, *Manajemen Dan Motivasi*, Jakarta Balai Aksara
- Cleeton, G, U. Dan C, W.1999.*Mason Leadership*, Cet,
- Daft,Richard L 2003 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Penerbit Erlangga
- David Osborne, 1991 *Mewiraurahakan Birokrasi*. PT Pustaka Binaman Presssindo.
- Jamaluddin. 1996. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. APDN Press
- Kartono, Kartini. 1993. *Pemerintahan dan Kepemimpinan*. Rajawali Press.Sawe,.
- Saparin, Sumber. 1996. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. GhaliaIndonesia.
- Siagian, SP. 1991. *Administrasi Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1984. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES.
- Syarif, Roesli. 1991. *Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan*. Bina Aksara. bandung
- Tjiptoherianto, Priyono. 1993. *Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Prisma.
- Widjaya, AW. 1992. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Rajawali Press.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Prof. Dr. Sugiono. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.cv bandung

Hersey Dan Blanchard, 2004, *Manajemen Of Organization Behavior* : Utilizing
HumanHesources, Printice Hall New Jersey